

Oknum Polisi di Riau yang Memaki Korban Pemerkosaan Diperiksa Propam

PEKANBARU (IM) - Polres Rokan Hulu (Rohul), Riau bakal menindak tegas oknum anggota Polsek Tambusai Utara yang diduga memaki korban pemerkosaan berinisial Z. Bahkan si oknum polisi itu mengancam akan menjadikan korban sebagai tersangka.

Aksi tidak pantas yang dilakukan oknum polisi tersebut direkam korban lalu menjadi viral di media sosial.

"Sedang dilakukan pemeriksaan terhadap anggota itu oleh Propam," kata Wakapolres Rohul Kumpul Adi Prabowo kepada MNC Portal Kamis (9/12).

Dari keterangan suami korban, Sur, oknum yang mencaci maki mereka adalah Ga, jabatan Kanit Reskrim Polsek Tambusai Utara dan anak buahnya Sin. Peristiwa mencaci maki korban dan keluarganya itu terjadi di rumah korban di Mahato.

Dia mengaku, terpaksa merekam video karena sudah sering dicaci maki. Padahal, dirinya hanya ingin mencari

keadilan atas kejadian pilu yang menimpa istri dan anaknya.

Sur mengatakan, caci maki dan ucapan kata-kata kotor oknum polisi itu lantaran pihak keluarga dan korban menolak berdamai dengan pelaku pemerkosa, Andika. Pihak keluarga, pun berjuang agar para pelaku ditangkap.

Saat ini, setidaknya masih ada tiga pelaku lain yakni Mal, Ijul, dan Ateng, yang belum ditangkap polisi terkait kasus pencabulan itu.

"Kita akan tindak lanjut itu sebagai koreksi internal. Kita akan kumpulkan data dulu. Kalau ada pelanggaran disiplin kita berikan sanksi," ujar Adi Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pengakuan korban dicaci maki oknum penyidik Polsek Tambusai Utara viral di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat oknum polisi memaki korban dan menyebut korban sebagai

pelacur. Z sendiri mengaku diperkosa empat orang di lokasi hari berbeda di bulan September 2021. • Ius

Satu Mafia Tanah di Jaktim Ditangkap, Sudah Raup Miliaran Rupiah dari Korban

JAKARTA (IM) - Seorang mafia tanah berinisial AP (48) yang selama ini beroperasi di wilayah Jakarta Timur, ditangkap aparat Polres Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Komisaris Besar Erwin Kurniawan mengatakan, AP dalam aksinya kerap menggunakan modus akta jual beli (AJB) palsu.

"Akta notaris-nya memang ada, tetapi ketika penandatanganan atau ketika penyerahan itu, dia (AP) memalsukan tandatangan korban, sehingga terjadi pemalsuan," tutur Erwin saat konferensi pers, Kamis (9/12).

Calon pembeli dibuat percaya dan terjadilah penipuan. Mereka kemudian memberikan uang kepada AP. Sejuah ini, AP telah menipu tiga korban dengan total keuntungan hingga Rp 2,1 miliar. Tanah yang dijanjikan AP kepada para korbannya ada di wilayah Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, dan Gedong, Pasar

Rebo.

Modus mafia tanah itu pertama kali terendus setelah salah satu korban melaporkan kasus ini ke Mapolres Jakarta Timur pada 23 April 2021.

"AP ini menjanjikan tanah dengan nilai tertentu. Kemudian tanah ini setelah dicek oleh korban, ternyata milik orang lain," tutur Erwin.

Barang bukti berupa riwayat transfer, kliring, bilyet giro, dan AJB palsu diamankan. AP dijerat Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Erwin mengimbau, jika masyarakat hendak membeli tanah agar melakukan pengecekan ke kantor BPN dan kelurahan setempat yang memiliki riwayat tanah.

"Di BPN ada pelayanan informasi apabila ada yang mau melakukan transaksi pembelian tanah. Kroscek ke BPN dan cek ke kelurahan," kata Erwin. • Ius

IDN/ANTARA



PENYEKATAN JALUR MENUJU LOKASI BENCANA
Anggota Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jatim melakukan penyekatan di depan jalur masuk menuju lokasi bencana letusan gunung Semeru di Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (9/12). Penyekatan tersebut dilakukan untuk mencegah kendaraan wisatawan yang akan menuju lokasi bencana karena akan mengganggu proses evakuasi.

Polda Metro Bongkar Sindikat Narkoba Jaringan Internasional Kongo hingga Kanada

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya bersama Sudit Narkoba Bea Cukai DKI Jakarta membongkar peredaran narkoba jenis sabu dan Lyrics acid diethylamide (LSD) sindikat jaringan internasional Kongo-Uganda, Kanada hingga Tiongkok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menuturkan, pengungkapan narkotika yang dilakukan mulai dari pertengahan November. Dalam sindikat itu diamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 16,88 Kg, serta LSD dengan jumlah 800 lembar.

"Ini adalah jaringan internasional. Tentunya pihak PMJ bekerjasama dan dibantu dengan pihak Bea Cukai," ujar Endra, di Polda Metro Jaya, Kamis (9/12).

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Kombes Pol Mukti Juharsa mengatakan, barang erlangar tersebut di pasok dari sejumlah negara seperti Tiongkok, Kanada, Uganda dan Afrika dengan modus pemesanan.

Mereka menyelundupkan barang melalui sejumlah barang seperti sparepart mobil dan sejumlah barang antik untuk kerajinan patung.

"Modus bisa dari piston mobil, bola-bola," jelasnya.

Dia menyebut bahwa LSD adalah barang narkoba tren tahun 1980. Saat ini LSD mulai kembali banyak dengan efek halusinasi dan sangat membahayakan.

"Kerjasamanya dengan bea cukai jadi barbuq masuk dari luar negeri terdeteksi oleh kami. Karena ada kerjasama bersama yang disepakati dengan Bea Cukai setiap barang masuk ke Jakarta kita harus join investigasi dan berhasil semua," tuturnya.

Zulpan menerangkan pihaknya berhasil mengamankan 39 tersangka yang seluruhnya adalah WNI. Para tersangka memasok barang haram tersebut dengan memasokkan barang haram itu melalui sparepart, hingga seni kerajinan berbentuk batu untuk mengelabui petugas.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka bakal dijerat UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 ayat 2, Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 111 ayat 1 juncto Pasal 132, UU Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga hukuman mati. • Ius

12 | PoliceLine



IDN/ANTARA

PELANTIKAN MANTAN PEGAWAI KPK MENJADI ASN POLRI

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kedua kiri) menyerahkan surat pengangkatan kepada perwakilan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pelantikan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/12). Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 mantan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan dan Etika yang Baik

Kapolri menegaskan untuk pemenuhan SDM Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai 'dapur' pengolahan SDM Polri.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo ingin personel Polri memiliki kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etika yang baik agar dekat dan dicintai masyarakat.

Ia pun berharap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) polisi berkualitas dengan tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri.

"Output yang kita harapkan, di mana mereka memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kom-

petensi leadership. Dengan demikian, betul-betul bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang memiliki SDM yang mumpuni, unggul, dan profesional," kata Listyo dalam sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, sebagaimana dikutip dari keterangan pers, Kamis (9/12).

Listyo ingin, Lemdiklat Polri menjadi "dapur" pengolahan SDM Polri yang unggul. Ia menegaskan, kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etika harus diterapkan di seluruh pendid-

ikan yang ada.

Mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).

"Untuk pemenuhan SDM Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai 'dapur' pengolahan SDM Polri," tuturnya.

Menurut Listyo, tiga kompetensi itu mutlak harus dimiliki oleh personel kepolisian. Karena itu, dia berharap, Lemdiklat Polri menanamkan ketiga hal tersebut sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional.

"Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan

tugas terkini," tuturnya.

Listyo pun mengingatkan soal harapan Presiden Joko Widodo kepada Polri untuk mewujudkan SDM yang ung-

gul dan "Presisi" (prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan) dalam menjalankan tugas serta kewenangan. • Ius

Soal Penahanan Bripda Randy, Polri: Tidak Ada Pembiaran Kasus

JAKARTA (IM) - Polri menegaskan jajarannya tidak pernah melakukan pembiaran kasus, termasuk penahanan Bripda Randy Bagus yang menyuruh pacarnya Novia Widyasari untuk mengaborsi kandungannya hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.

Penegakan ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, menjawab keraguan masyarakat ihwal penahanan Bripda Randy hanya formalitas belaka.

Rusdi memastikan, hukum sebab akibat ditetapkan di Polri. Pasalnya, jika ada anggota yang melakukan hal baik, akan diganjar dengan apresiasi, namun ketika sebaliknya maka akan dikenakan sanksi.

"Prinsipnya di institusi ini, tak ada pembiaran, jika ada anggota yang melakukan hal positif pastinya akan dapat ganjaran positif juga. Ketika ada yang melakukan pelanggaran pasti akan diberikan sanksi," ujar Rusdi, Rabu (8/12).

Rusdi mengatakan, kasus yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur ini telah ditangani dengan serius. Dia kembali menegaskan, bagi siapapun anggota yang melanggar, baik itu etika, disiplin hingga pidana akan dilakukan tindakan tegas.

"Kasus di Jatim di Polres Mojokerto sudah jelas, Polri akan menindak tegas bagi anggota yang melanggar peraturan, baik disiplin, etika, bahkan pidana sekalipun. Akan dilakukan tindakan secara tegas," katanya.

Meskipun orang tua Randy telah menyampaikan permohonan maaf atas nama sang anak, dirinya memastikan bahwa kasus ini terus berlanjut. Untuk kepastian selanjutnya, dia meminta menunggu hingga beberapa hari ke depan.

"Semua sedang berproses, pemeriksaan masih terus berjalan belum final ini ya semua. Kita tunggu beberapa hari ke depan," ucapnya.

Bripda Randy ditahan lantaran diduga melanggar sanksi hukuman etik dan pidana. Dia juga diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari satuan kepolisian.

Sebelumnya kasus kematian pacarnya, Novia Widyasari Rahayu pelanggaran pasti akan diberikan sanksi," ujar Rusdi, Rabu (8/12).

Rusdi mengatakan, kasus yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur ini telah ditangani dengan serius. Dia kembali menegaskan, bagi siapapun anggota yang melanggar, baik itu etika, disiplin hingga pidana akan dilakukan tindakan tegas.

Novel Baswedan Cs Siap Tancap Gas Awasi Dana Covid dan Proyek Strategis

JAKARTA (IM) - Sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Pelantikan dilakukan oleh asisten kapolri dari bidang sumber daya manusia (SDM) di Mabes Polri.

Setelah dilantik, apakah Novel Baswedan dan kawan-kawan langsung bekerja menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan korupsi?

Mantan penyidik KPK, Aulia Postiera mengatakan, ia dan 43 rekannya tidak akan langsung bekerja setelah dilantik menjadi ASN Polri. Aulia dan 43 mantan pegawai KPK lainnya tersebut masih harus menjalani masa orientasi di Bandung selama dua pekan setelah dilantik menjadi ASN Polri.

"Rencananya kita akan langsung berangkat ke Bandung untuk mengikuti orientasi selama 2 minggu. Iya setelah dilantik," kata Aulia saat dikonfirmasi, Kamis (9/12).

Dibeberkan Hotman, ia dan 43 mantan pegawai KPK lainnya akan menjalani pendidikan orientasi setelah dilantik menjadi ASN Polri.

Hotman mengaku belum mengetahui posisi yang akan ditempatkan mantan pegawai KPK di Polri. Pada pertemuan terakhir dengan Polri, kata Hotman, baru dijelaskan soal proses perekrutan. "Kemarin sosialisasi kita masih bicara proses perekrutan, seleksi kompetensi, pelantikan sampai dengan pendidikan orientasi," kata Hotman dikonfirmasi terpisah.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap sebelumnya mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan tugas khusus kepada para mantan pegawai KPK. Tugas klu-

su itu yakni mengawasi dana Covid-19, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta sejumlah proyek strategis.

"Kami akan fokus dalam penugasan-penugasan yaitu pertama mengawasi dana Covid. (Mengawasi) Proyek-proyek strategis nasional. Kemudian dana pemulihan ekonomi nasional yang sangat kuat dan memang belum ada orang-orang atau instansi yang mengawasi terhadap proyek strategis tersebut yang tadi disebutkan," ujar Yudi kepada wartawan.

Novel Siap Ikut Pelantikan

Sementara itu, Novel Baswedan yang Ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, sesaat akan dilantik, menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengikuti proses pelantikan yang digelar tepat pada momentum Hari Antikorupsi se-dunia hari ini.

"Saya alhamdulillah sudah ke sini untuk persiapan mengikuti pelantikan ASN Polri," kata Novel di Mabes Polri, Kamis (9/12).

Novel berharap, dengan dilantik sebagai ASN Polri, dapat memberikan manfaat untuk Polri dan Bangsa Indonesia terkait pemberantasan praktik korupsi.

"Pada dasarnya saya yakin kami diharapkan bisa melakukan tugas tugas dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan, tapi polanya dan segala macam nanti kita dibicarakan lebih lanjut ya," ujar Novel.

Diketahui, 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersedia untuk menjadi ASN di institusi Polri. Salah satunya adalah, Novel Baswedan. Sebelum dilantik, mereka telah melalui proses sosialisasi dan dilakukan tes asesmen. • Ius



IDN/ANTARA

KONFERENSI PERS PENANGKAPAN ARTIS JEFF SMITH

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan (tengah) memberikan keterangan terkait penangkapan artis Jeff Smith di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/12). Jeff Smith ditangkap terkait kasus narkoba dengan barang bukti narkoba jenis Lysergic acid diethylamide (LSD).